

Senin, 26 Juni 2023

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Imbal Hasil Unitlink Masih Positif
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Penyertaan Modal Negara
Halaman/URL	3
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	Positive

| PENYERTAAN MODAL NEGARA |

BERTARUH DENGAN DANA JUMBO SEHATKAN 'PELAT MERAH'

Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan jajaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, perihal pengambilan keputusan penyertaan modal negara, relatif berjalan mulus.

Anitana Wilya Puspa & Rahmat Fauzan
redaksi@bisnis.com

Fokus

Budhy Setiawan, anggota Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Barat memperoleh tugas untuk membacakan pandangan misi fraksi terkait dengan penyertaan modal negara (PMN) tambahan tahun anggaran 2023 kepada empat perusahaan pelat merah.

Alokasi PMN itu diambil dari biaya cadangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Korporasi pelat merah yang mendapat suntikan PMN yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) senilai Rp3 triliun.

Lalu, PT Aviast Parwisata Indonesia (Indoorev) dengan nilai penyertaan negara Rp1,19 triliun, selanjutnya PT Reasuransi Indonesia Utama dengan PMN senilai Rp1 triliun, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau IDFood senilai Rp500 miliar.

"Pemerintah PMN idealnya menjadi profit center, bukan sebaliknya malah menjadi beban dan biaya," kata anggota Fraksi Partai Golkar Budhy Setiawan dalam Rapat Kerja, Kamis (15/6).

Lewat PMN yang diberikan, katanya kinerja perusahaan pelat merah medinya terungkit dan kontribusi terhadap perekonomian lewat penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekosistem di sekitar kawasan, dan pengembalian kepada negara lewat dividen, menjadi optimal.

Partai yang dinakhodai oleh Airlangga Hartono itu juga meminta supaya Kementerian BUMN melakukan pengawasan terkait dengan tata kelola PMN, termasuk dari aspek dampaknya terhadap kinerja korporasi ke depan.

Permintaan yang tergolong wajar jika merujuk data selanjutnya lima tahun terakhir, alokasi PMN untuk korporasi pelat merah terus meningkat.

Peningkatan signifikan suntikan modal pemerintah ke BUMN

terjadi sejak 2019 dengan dana Rp17,8 triliun, naik hampir lima kali dibandingkan PMN pada 2018 yang mencapai Rp3,6 triliun.

Ketika pandemi menyerang pada 2020, uluran tangan pemerintah ke BUMN kian tebal, naik menjadi Rp31,3 triliun pada 2020. Puncaknya adalah pada 2021 dengan gelontoran dana Rp71,2 triliun. Meski turun pada 2022, tetapi nilai PMN masih jumbo, mencapai Rp38,5 triliun. Sebelum adanya penambahan, alokasi PMN 2023 tembus Rp41,31 triliun.

Untuk tahun depan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan PMN tunai sebesar Rp57,96 triliun dan PMN non tunai Rp673 miliar. Besarnya dana PMN yang diminta BUMN ini menjadi pertanyaan sejumlah pihak soal efektivitasnya.

Satu sisi, perusahaan pelat merah yang mendapat darah segar lewat PMN, kinerjanya tidak sepenuhnya positif. Beberapa korporasi yang memperoleh suntikan modal negara, malah bergelut dengan ekuitas negatif.

Wahyu Sanjaya, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyatakan telah melakukan kunjungan spesifik dan menggarap pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pertemuan tersebut itu guna membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan PMN kepada sejumlah BUMN.

Sementara itu, data BAKN yang diterima dari laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, ketiga BUMN penerima PMN itu memiliki nilai utang

cukup besar. Sebagai contoh, Hutama Karya menanggung beban hingga Rp71,53 triliun dan diperkirakan sampai dengan 2026, perusahaan karya itu menanggung rugi hingga Rp67 triliun.

"Kami tentu berha-

rap BAKN bisa mengambil kesimpulan terkait langkah-langkah ke depan yang perlu diwujudkan dan dilakukan pemerintah terkait pemberian PMN terhadap masing-masing BUMN," ujarnya Selasa (13/6).

Wahyu berharap ke depannya agar target pemberian PMN bisa lebih tepat sasaran dan tidak menjadi beban bagi BUMN itu sendiri. BAKN berkomitmen untuk terus memperhatikan dari sisi akuntabilitas keuangan, sehingga pemberian PMN tepat guna, tepat sasaran, dan tidak membebani perusahaan atau BUMN terkait.

"Kami tidak ingin, BUMN yang mendapatkan PMN, tetapi justru akhirnya membebani BUMN dan bisa berdampak buruk terhadap masing-masing perusahaan," ujar Wahyu.

RISIKO APBN

Sementara itu anggota DPR RI Fraksi Partai Koalisi Sejahtera (PKS) Amin AK menilai permintaan PMN senilai Rp57,9 triliun kepada 10 BUMN untuk tahun depan cukup risikonya karena beberapa faktor.

"Bukan hanya berpotensi ada penyalangan penggunaan dana PMN, tetapi juga karena beban APBN yang semakin berat," kata Amin kepada Bisnis, Jumat (23/6).

Selain itu, keuangan negara masih di-bebani pembungkahan utang dengan bunga yang harus dibayarkan mencapai triliunan rupiah.

Oleh karena itu, Fraksi PKS secara tegas menolak pemberian PMN tahun

2024, dan mendesak pemerintah menggunakan APBN untuk kepentingan rakyat yang lebih mendesak, termasuk advokasi dan bantuan untuk pelaku usaha kecil dan menengah," ujarnya.

Di samping itu, beberapa kritik juga dilayangkan parlemen terhadap pengawasan kinerja BUMN penerima PMN yang dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*).

Berdasarkan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil pekerjaan atas dana PMN 2015 dan 2016 senilai Rp10,49 triliun untuk 13 BUMN belum optimal.

Kendati demikian, dia menilai penyaluran PMN tidak seluruhnya gagal efektif. Salah satu contoh adalah penyaluran PMN yang disebut mampu melokalkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dari kepailitan, dan berhasil untung.

Penyaluran modal negara dilihat sebagai salah satu variabel penting yang menyelamatkan Garuda Indonesia dari kondisi sulit.

Beberapa hal yang perlu jadi evaluasi a.l. pengelolaan BUMN mesti diserahkan kepada jajaran yang kompeten, profesional, serta memiliki integritas.

Selain itu, perlu transparansi pengelolaan BUMN agar bisa diakses publik terdapat jajaran direksi, komisi, maupun manajemen lainnya dapat lebih hati-hati.

DANA JUMBO TOPANG BUMN

Dalam periode 2019 sampai dengan 2022 pemerintah memberikan dukungan fiskal ke sejumlah BUMN. Selain subsidi dan kompensasi, ada juga uluran PMN yang mencapai Rp245,2 triliun pada periode tersebut. Penerima utamanya UMN di bidang infrastruktur, energi, dan pembiayaan/UMKM.



Pembiayaan Investasi APBN 2018-2022 (Rp Triliun)

	2018	2019	2020	2021	2022
Investasi Kepada BUMN	3,6	17,8	31,3	71,2	38,5
Investasi Kepada Lembaga/Badan Lain	2,5	2,5	25,0	21,0	-
Investasi Kepada BLU	52,7	28,2	31,3	64,0	52,8
Investasi kepada Organisasi/UKU/Badan Usaha Internasional	2,3	2,3	0,7	0,9	0,9
Penerimaan Kembali Investasi	-	-	1,4	22,0	24,4
Investasi Pemerintah	-	-	-	38,4	9,8
Pembiayaan Investasi Lainnya	-	-	-	-	51,0
Cadangan Pembiayaan Investasi	-	-	-	-	21,5
Jumlah	61,1	49,4	104,7	142,5	154,2
Investasi Pemerintah (Rp Triliun)	2018	2019	2020	2021	2022
Investasi Pemerintah	-	-	38,4	9,8	19,1
1 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-	-	8,5	-	-
2 PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	3,5	-	-
3 Perum Perumnas	-	-	0,7	-	-
4 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	-	-	4,0	-	-
5 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	-	3,0	-	-
6 Pinjaman PEN Daerah	-	-	18,8	9,8	-
7 Program FLPP	-	-	-	-	19,1

	2018	2019	2020	2021	2022
1 PMN PT Sarana MultiGriya Finansial (Persero)	-	0,8	1,8	2,3	2,0
2 PMN PT Hutama Karya (Persero)	-	10,5	11,0	25,2	23,9
3 PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	-	-	6,3	20,0	-
4 PMN PT Geo Diga Energi (Persero)	-	-	0,7	-	-
5 PMN PT PMN (Persero)	-	-	2,5	-	-
6 PMN PT PLN (Persero)	-	6,5	5,0	5,0	5,0
7 PMN kepada PT Pelindo III (Persero)	-	-	-	1,2	-
8 PMN kepada PT PAL Indonesia (Persero)	-	-	-	1,3	-
9 PMN kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	-	-	-	0,5	0,5
10 PMN kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	-	-	-	1,0	-
11 PMN kepada PT Perumahan Infrastruktur Indonesia (Persero)	-	-	-	1,6	-
12 PMN kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	-	-	7,9	3,0
13 PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3,6	-	-	6,9	-
14 PMN kepada PT Biolaflora (Persero)	-	-	-	2,0	-
15 PMN kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	-	-	-	2,0
16 PMN kepada Perum Perumnas	-	-	-	-	1,6

BISNIS/ANWAR AFANDI

Sumber: Kementerian Keuangan, Data Keuangan Semester APBN 2023

Judul	Likuidasi Kresna Life Menambah Derita Nasabah
Nama Media	Kontan
Newstrend	OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Kresna Life
Halaman/URL	1
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	negative

■ PENCABUTAN IZIN KRESNA LIFE

Likuidasi Kresna Life Menambah Derita Nasabah

Ferry Saputra

Perkembangan Terakhir Sejumlah Kasus Asuransi di Tanah Air

JAKARTA. Nasib nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna alias Kresna Life masih gelap usai dicabutnya izin usaha perusahaan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, OJK memerintahkan likuidasi. Opsi ini justru menimbulkan kekhawatiran dana nasabah sulit kembali.

Kuasa Hukum Nasabah Kresna Life Benny Wullur berniat mendesak bersama-sama dengan perusahaan asuransi jiwa ini untuk menggugat OJK secara perdata. "Kami akan menyiapkan gugatan perdata terhadap OJK. Ditambah secara pribadi pejabat yang tan-datangan cabut izin juga dianggap menyebabkan kelalai-an dan dugaan lemahnya pengawasan serta perlindungan konsumen. Tentu akan meminta ganti rugi," katanya, akhir pekan lalu.

Benny memaparkan, sebagai regulator, sebaiknya OJK tidak memberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha (PKU), bahkan mencabut izin usaha. Ia berharap OJK bisa memperbaiki putusan pencabutan izin usaha tersebut.

Sebagai awalan, OJK me-

Wanaartha Life Rp 15 triliun

OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life pada 5 Desember 2022. Hingga kini kerja tim likuidasi masih belum selesai



mang sudah memerintahkan manajemen dan pemegang saham Kresna Life membentuk tim likuidasi. Tim likuidasi tersebut akan melakukan verifikasi terhadap seluruh pemegang polis.

Selanjutnya, tim likuidasi ini akan menyisir segala aset yang berkaitan dengan Kresna Life. Aset-aset tersebut akan dihitung untuk membayar kewajiban Kresna Life.

Memang nasabah dari perusahaan asuransi ini akan menjadi kreditur preferen atau pihak yang pembayarannya diprioritaskan. Tapi, jika dilihat dari aset yang dimiliki Kresna Life, jumlahnya masih jauh dari nilai kewajiban yang

Kresna Life Sekitar Rp 5 triliun

OJK mencabut izin usaha dan harus segera membentuk tim likuidasi



mencapai Rp 5,2 triliun.

Selain itu, berkaca dari likuidasi yang saat ini sedang berjalan di PT Asuransi Jiwa Adisara Wanaartha alias Wanaartha Life, ternyata prosesnya tak berjalan cepat, justru banyak menemukan hambatan. Salah satunya urusan pidana yang bisa menghambat berlakunya proses likuidasi.

Sebagai gambaran, Wanaartha dan Kresna Life sama-sama menghadapi proses pidana di kepolisian.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, setidaknya membutuhkan waktu dua tahun untuk menyelesaikan proses likuidasi. Ia menilai jalur penundaan kewajiban

AJB Bumiputera 1912 Sekitar Rp 13 triliun

Perusahaan menjalani RPK, nasabah ada yang menolak nilai manfaat turun.



pembayaran utang (PKPU) lebih tepat. Waktunya sesuai aturan, paling lama 270 hari.

Kendati begitu, ada perdebatan soal siapa yang bisa mengajukan PKPU ini. Dalam UU Perasruansian, hanya OJK yang bisa mengajukan pailit atau PKPU. Sementara nasabah yang berkepentingan tidak bisa meminta PKPU.

Sebelumnya, saat nasabah Wanaartha Life mengajukan PKPU, OJK meminta agar permohonan ini ditolak. Permohonan PKPU Wanaartha Life akhirnya ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Di sisi lain, nasabah Kresna Life yang setuju dengan pengalihan pinjaman subordinasi

Asuransi Jiwasraya Rp 16,8 triliun

Pemegang polis mendapat tawaran restrukturisasi dengan berpindah ke IFG Life dan ada haircut



Asuransi Asabri Rp 22,78 triliun

Kasus pidana sudah selesai. Kini pihak berwenang mengejar aset para terpidana.



(SOL) juga tak puas dengan langkah OJK mencabut izin usaha Kresna Life.

Tapi, Santy, seorang nasabah Kresna Life yang menolak pinjaman SOL menyebutkan, OJK sudah menjalankan kerja sebagai regulator. "Banyak nasabah yang skeptis seolah-olah OJK tetap tidak punya solusi untuk mengembalikan uang nasabah. Memang masih perlu dibuktikan apakah mereka akan membuat terobosan hukum mengembalikan dana nasabah," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, KONTAN belum mendapatkan jawaban dari manajemen Kresna Life mengenai sanksi baru dari OJK ini. ■

Judul	Berita Foto - Izin Usaha Kresna Life Dicabut
Nama Media	Kontan
Newstrend	OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Kresna Life
Halaman/URL	4
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	negative

Izin Usaha Kresna Life Dicabut



Dok. OJK

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiyono (kedua kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi (kedua kanan) bersama jajaran saat konferensi pers soal pencabutan ijin usaha Kresna Life di Jakarta, Jumat (23/6). OJK akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life, yakni mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut. Pemegang polis dapat menghubungi manajemen Kresna Life dalam rangka pelayanan konsumen sampai dengan dibentuknya tim likuidasi perusahaan asuransi ini.

Judul	IFG Life Janjikan Perbaiki Modal
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Asuransi IFG Life sponsor utama GFNY Bali 2023
Halaman/URL	15
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	Positif

| RESPONS TEMUAN BPK |

IFG Life Janjikan Perbaiki Modal

Bisnis, JAKARTA — Indonesia Financial Group (IFG) menyatakan akan menempuh sederet langkah untuk memperbaiki pengelolaan penyertaan modal negara dan pengalihan polis Jiwasraya yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan tidak sesuai ketentuan.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha mengatakan, sebagai *holding*, IFG akan selalu memonitor IFG Life agar selalu menjaga RBC pada tingkat yang sehat sehingga mampu memenuhi semua kewajiban kepada pemegang polis sesuai jadwal pembayaran.

"Selanjutnya penguatan permodalan setelah penerimaan PMN akan dipupuk dari *retained earning* [laba ditahan] hasil usaha pengembangan bisnis," kata Oktarina kepada *Bisnis*, Sabtu (24/6).

IFG mendapatkan kembali

PMN Rp3 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis pada tahun ini. Oktarina menambahkan perusahaan akan melakukan investasi secara prudent berbasis *liabilities driven investment* (LDI) dengan memperhatikan pedoman kebijakan investasi yang memuat selera risiko, *portfolio universe*, panduan portofolio, dan penerapan manajemen risiko secara disiplin.

Oktarina menjelaskan evaluasi juga telah dilakukan terhadap rencana penyehatan keuangan (RPK), termasuk evaluasi terhadap keberadaan dan penilaian aset.

IFG, IFG Life, dan Jiwasraya telah menyusun rencana tindak baru dengan terus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan selaku pemegang saham, serta OJK selaku regulator.

"Dalam proses perhitungan

kebutuhan pendanaan untuk penyelesaian polis secara tuntas dilakukan oleh konsultan independen dan didampingi oleh BPKP," kata Oktarina.

BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 menyatakan perencanaan RPK Asuransi Jiwasraya dan kajian bersama PMN belum didukung perhitungan yang memadai.

Pelaksanaan pengalihan aset dan liabilitas juga belum sesuai dengan proyeksi waktu pengalihan dan pencairan PMN maupun realisasi nilai dan kualitas aset yang dialihkan.

"Akibatnya, terdapat risiko penurunan tingkat solvabilitas IFG Life di bawah ketentuan yang diatur dalam POJK No. 71/POJK.05/2016 dan risiko permasalahan likuiditas IFG Life untuk pembayaran klaim di masa depan," tulis BPK dalam laporannya. (Pernita H. Untari)

Judul	Penjualan Aset Bumiputera
Nama Media	Kontan
Newstrend	OJK memberikan peluang bagi perusahaan asuransi jiwa
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	positive

Penjualan Aset Bumiputera

JAKARTA. PT Asuransi AJB Bumiputera 1912 terus mengupayakan likuiditas untuk bisa memenuhi kewajiban ke pemegang saham. Salah satunya adalah dengan melakukan penjualan aset properti.

RM. Bagus Irawan, Juru Bicara BPA AJB Bumiputera 1912, menyebutkan, aset properti di Surabaya bakalan segera laku. Saat ini untuk aset di Surabaya tersebut sedang dalam tahap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). "Proses menuju pembuatan Akta Jual Beli (AJB)," ujar Bagus kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Penjualan aset ini memang untuk menguatkan likuiditas dari AJB Bumiputera yang sedang kesulitan untuk mencicil. Nilai aset yang dimiliki oleh AJB Bumiputera mencapai Rp 12 triliun. Aset properti mendominasi dari keseluruhan total aset tersebut, dengan nilai mencapai sekitar Rp 7 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan peluang bagi perusahaan asuransi jiwa bersama ini untuk meminjam dana ke bank.

Lamgiat Siringoringo

Judul	Kejagung Titip Lahan Kebun Kepada Camat
Nama Media	Rakyat Merdeka
Newstrend	Kejagung Sita Tanah Benny Tjokrosaputro
Halaman/URL	15
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	Positive

Eksekusi Aset Terpidana Kasus Jiwasraya

Kejagung Titip Lahan Kebun Kepada Camat

Kejaksanaan Agung melakukan sita eksekusi perkara korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Sasarannya aset terpidana Benny Tjokrosaputro.

ASET yang disita terletak di Desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Berupa lahan kebun yang di atasnamakan PT Abdinusa Ekapersada.

Terdapat 11 bidang tanah yang disita. Luas totalnya 130.746 meter persegi atau sekitar 13 hektare.

Untuk pengawasan aset ini, Kejaksanaan Agung menitipkan kepada Camat Parung Panjang. "Penitipan aset-aset ini guna mendapatkan perawatan khusus, dengan ketentuan tidak boleh mengubah bentuk, mengalihkan atau memperjualbelikannya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksanaan Agung, Ketut Sumedana.

Apabila diperlukan untuk keperluan lelang, Camat Parung Panjang harus mengembalikan aset

titipan ini kepada Kejaksanaan.

Sebelumnya, Kejaksanaan telah menitipkan 16 bidang tanah hasil sita eksekusi perkara Jiwasraya Benny Tjokro kepada Camat Parung Panjang.

Lahan yang dititipkan seluas 468.297 meter persegi atau 46,8 hektare terletak di Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang. Lahannya ditumbuhi bambu hingga karet.

Penitipan dan pengelolaan aset sitaan ini untuk memberikan insentif kepada masyarakat setempat. "Agar lahan dikelola dan hasilnya dijadikan pemasukan bagi kas daerah tersebut," kata Sumedana.

Menurutnya, Kejaksanaan ingin memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi aset. Selain itu, untuk memastikan aset sitaan tidak



Ketut Sumedana

dipindahtangankan ke pihak lain maupun diperjualbelikan.

Tim jaksa eksekutor yang beranggotakan 12 orang membuat berita acara bersama Kepala Desa, Camat dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor untuk

penitipan aset.

"Sementara statusnya dititipkan. Nantinya juga akan dilelang untuk kepentingan mengganti kerugian keuangan negara," kata Sumedana.

Sita eksekusi aset ini berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksanaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (P-48A) Nomor: Print-734/M.1.10/Fu.1/09/2021 tanggal 29 September 2021 juncto Print-145/1.10/Fu.1/05/2022 tanggal 11 Mei 2022.

Kejaksanaan melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 7/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2937 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Ter-

pidana Benny Tjokrosaputro. Dalam putusan tersebut, Benny Tjokro dikenai hukuman tambahan membayar uang pengganti sekitar Rp 6 triliun.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksanaan Agung, Kuntadi mengatakan, jajarannya bersama tim jaksa eksekutor tengah menghimpun seluruh data aset terpidana Benny Tjokro.

"Sebagian sudah disita eksekusi. Aset lainnya pasti akan disita sesuai dengan putusan pengadilan," tandasnya.

Nilai aset yang disita diperhitungkan bersama tim taksasi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Taksiran nilai ini diperlukan untuk keperluan pelelangan.

"Pada prinsipnya kita mengoptimalkan tugas pokok sita eksekusi. Soal berapa nilainya itu nanti akan diperhitungkan tim," tutup Kuntadi. ■ **GPG**

Judul	Memproteksi Asuransi
Nama Media	Kontan
Newstrend	OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Kresna Life
Halaman/URL	15
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	Positive

Tajuk

Memproteksi Asuransi

Harris Hadinata

Asuransi merupakan proteksi terhadap risiko, dalam hal ini risiko finansial. Seseorang yang berasuransi artinya ia mengalihkan risiko, dalam hal ini terutama risiko finansial, kepada pihak ketiga, yakni perusahaan yang menerbitkan asuransi. Begitulah pengertian asuransi yang banyak disampaikan

Lantas, bagaimana kalau ternyata perusahaan yang seharusnya menanggung risiko tersebut ternyata justru perusahaan yang berisiko? Sebagaimana banyak kejadian akhir-akhir ini, alih-alih bisa mengalihkan dan memproteksi risiko, nasabah asuransi justru berpotensi kehilangan duitnya.

Kejatuhan perusahaan asuransi di Indonesia masih berlanjut. Akhir pekan lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha Kresna Life. Alasannya antara lain, perusahaan asuransi ini tidak kunjung sukses melaksanakan rencana penyehatan keuangan yang sudah diajukan pada OJK.

Perkembangan ini menambah panjang daftar nasabah asuransi yang nasibnya makin terkatung-katung. Nasabah Kresna Life kini harus menunggu pembentukan tim likuidasi, sebelum kemudian tim likuidasi bekerja dan memutuskan

proses restrukturisasi serta pengembalian duit nasabah.

KONTAN juga sempat melakukan wawancara dengan nasabah Kresna Life soal perkembangan terbaru ini. Sejumlah nasabah mulai agak pesimis dana mereka bisa kembali. Apalagi proses kerja tim likuidasi membutuhkan waktu lama.

Karena itu, kehadiran lembaga penjamin dana pemegang polis sudah sangat penting. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah ditunjuk untuk menjadi pelaksana program penjamin polis.

Cuma memang, fungsi penjamin dana pemegang polis ini tampaknya baru bisa berjalan di 2028 mendatang. UU P2SK memang memberi waktu kepada LPS untuk mempersiapkan pelaksanaan program ini selama lima tahun ke depan.

Tentu saja, industri asuransi sendiri juga masih perlu dibenahi. Sedikit demi sedikit, pembenahan memang mulai berjalan. Misal, sampai beberapa waktu lalu, masih ada agen asuransi yang menawarkan produk asuransi dengan sebutan produk investasi.

OJK sudah mulai menertibkan cara pemasaran asuransi yang bisa membuat nasabah salah paham tersebut, antara lain dengan menerbitkan Peraturan OJK. Di sisi lain, tetap perlu ada edukasi ke masyarakat, asuransi adalah produk proteksi, bukan investasi. ■

Judul	OJK Persempit Ruang Gerak Pendanaan Kejahatan
Nama Media	Media Indonesia
Newstrend	OJK memperbarui aturan
Halaman/URL	A1
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	Positive

OJK Persempit Ruang Gerak Pendanaan Kejahatan

Inovasi dan teknologi yang terus berkembang di industri keuangan membuat OJK harus menutup celah sekecil apa pun dari potensi tindak kejahatan.

FETRY WURYASTI
fetry@mediaindonesia.com

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) baru saja memperbarui aturan untuk menangkis pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dengan menerbitkan Peraturan Nomor 8/2023 yang menggantikan Peraturan Nomor 12/2017, OJK berusaha mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana tersebut.

Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menegaskan peraturan OJK yang mulai berlaku pada 14 Juni 2023 itu untuk memitigasi risiko tindak pidana yang menjadi ancaman serius bagi negara.

Peraturan itu juga selaras dengan prinsip internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta perkembangan inovasi dan teknologi yang harus diikuti penjagaan aspek keamanan dan kerahasiaan.

"Peraturan OJK ini merupakan komitmen OJK mendukung tujuan Indonesia menjadi anggota penuh FATF, yang menyaratkan sektor jasa keuangan memiliki ukuran dan materialitas signifikan," kata Mahendra.

Dia menerangkan terdapat berbagai substansi dalam Peraturan OJK Nomor 8/2023. Pertama, penambahan penyedia jasa keuangan (PJk) yang wajib menerapkan program antipencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Penyedia yang dimaksud, yakni wali



amanat, penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi, penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi atau penyelenggara program antitiga tindak pidana itu, serta penyedia jasa keuangan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan berada pada ranah kewenangan OJK.

Substansi kedua, adanya kewajiban penilaian, kebijakan, dan prosedur, mitigasi risiko pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), dan *attempted transaction* yang terkait dengan itu.

Di situ ditegaskan pemblokiran tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya (*without prior noticed*), penerapan kewenangan penerapan sanksi

atas pelanggaran, dan mitigasi risiko penghindaran sanksi (*sanction evasion*). Ketiga, penyedia jasa keuangan wajib memastikan bahwa profesi penunjang yang digunakan telah menerapkan program antitiga tindak pidana itu, serta terdaftar pada sistem informasi pelaporan yang dikelola PPATK (GoAML).

Selain itu, penyedia jasa keuangan juga diwajibkan menyusun dan menyampaikan *individual risk assessment* (IRA).

"Selanjutnya, OJK memberi waktu transisi bagi penyedia jasa keuangan paling lama enam bulan sejak diterbitkan peraturan dimaksud untuk melakukan penyesuaian," kata Mahendra.

Respons positif

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengapresiasi lahirnya peraturan itu

dan akan segera membuat penyesuaian.

"Atas berlakunya peraturan OJK tersebut, BRI telah menyusun dan menyiapkan rencana aksi, termasuk untuk pemenuhan beberapa kewajiban baru bagi penyedia jasa keuangan untuk menyampaikan laporan kepada OJK," kata Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto.

Beberapa rencana aksinya, yaitu pertama, bank akan membuat penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program antitindakan pidana yang dimaksud paling lama enam bulan sejak peraturan itu berlaku.

"Bank juga akan membuat pengisian dokumen penilaian risiko TPPU, TPPD, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual," kata Aestika.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri Rudi As Aturridha menambahkan,

bank kini juga wajib menyampaikan laporan rencana pengisian data yang disampaikan setiap tahun, paling lama akhir Desember sebelum periode pengisian data.

"Bank wajib menyampaikan laporan realisasi pengisian data (2023) yang disampaikan setiap tahun, paling lama akhir Januari setelah periode pengisian data berakhir," kata Rudi.

Sejumlah penyesuaian pelaporan mengikuti peraturan OJK itu juga disusunkan sektor asuransi jiwa guna mendukung pengembangan program antipencucian uang di Indonesia.

Pertama, laporan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang telah disusun secara individual untuk pertama kalinya paling lama 12 bulan sejak diberlakukannya peraturan itu.

"Kedua, laporan pengisian atas dokumen penilaian risiko tindak pidana itu yang telah disusun secara individual, yang disampaikan setiap tahun paling lambat akhir Juni," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu.

Ketiga, laporan penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program itu paling lambat enam bulan sejak diberlakukannya peraturan.

Keempat, laporan rencana pengisian data yang disampaikan setiap tahun paling lama akhir Januari setelah periode pengisian data berakhir.

Keenam, laporan pemblokiran kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) paling lama tiga hari kerja.

"Perusahaan menyampaikan tembusan laporan pemblokiran secara serta-merta kepada OJK dengan melampirkan berita acara pemblokiran secara serta-merta, paling lama tiga hari kerja sejak penyedia menerima daftar terduga teroris, dan proliferasi senjata pemusnah massal," kata Togar. (E-2)

Judul	Berita Foto - Gelar Donor Darah
Nama Media	Rakyat Merdeka
Newstrend	Kegiatan Donor Darah PertaLife Insurance
Halaman/URL	9
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	



MOHAMAD QORI/RAKYAT MERDEKA/RM.ID

GELAR DONOR DARAH: Vice President Customer Engagement and Service PertaLife Insurance Christina Eka Kurnia (kedua kanan) berbincang dengan peserta donor darah di Jakarta, Jumat (23/6). Kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan tersebut digelar PertaLife Insurance dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-38. Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Judul	Berasuransi Bisa Sekaligus Berwakaf
Nama Media	Pikiran Rakyat
Newstrend	Generali Indonesia Sediakan Medical Check Up Gratis di Friendship Run Semarang
Halaman/URL	9
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	Positive

Berasuransi Bisa Sekaligus Berwakaf

BANDUNG - Ruang kreativitas perluasan jangkauan layanan keuangan di Indonesia terbuka sangat lebar. Teranyar, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) dan PT Pos Indonesia (Pos Indonesia) melakukan kerja sama strategis dengan meluncurkan asuransi syariah 'Aku Berbagi' yang bisa diakses melalui aplikasi milik Pos Indonesia, Pospay. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memiliki proteksi jiwa dengan berbagai manfaat. Namun, pada saat yang sama mendapatkan manfaat warisan bagi keluarga sekaligus berbagi kepada sesama melalui konsep wakaf unik yang sangat terjangkau. CEO Generali Indonesia, Edy Tuhirman mengatakan, berbeda dengan konsep umum wakaf yang dikenal masyarakat yakni berupa lahan ataupun dalam bentuk donasi aset bernilai besar lainnya, butuh waktu yang lama, dan biasa dilakukan oleh orang yang berusia senior. Namun, dengan memiliki Aku Berbagi, siapapun bisa mendapatkan kemudahan dengan konsep wakaf uang, tanpa harus menunggu lama untuk memiliki aset tertentu. **(YK)*****

Judul	Izin Usaha Asuransi Kresna Life Resmi Dicabut
Nama Media	Ekonomi Neraca
Newstrend	OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Kresna Life
Halaman/URL	5
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	Positive

Izin Usaha Asuransi Kresna Life Resmi Dicabut

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life, dikarenakan sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus, rasio solvabilitas (risk based capital) Kresna Life tetap tidak memenuhi ketentuan minimum disyaratkan sesuai ketentuan.

■ NERACA

"Kresna Life tidak mampu menutup defisit keuangan, yaitu selisih kewajiban dengan aset melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Ogi menjelaskan, sebelumnya OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Kresna Life untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka. Dia menjelaskan bahwa Kresna Life tidak dapat melaksanakan upaya terakhir melalui penambahan modal oleh pemegang saham pengendali, dan penawaran konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (*Subordinated Loan/SOL*). "Kresna Life sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak mampu menunjukkan komitmen penambahan modal dari pemegang saham melalui *escrow account* dan menyampaikan perjanjian konversi SOL yang diaknotariskan," ujar Ogi.

OJK menetapkan Perintah Tertulis yang memerintahkan PT Duta Makmur Sejahtera (PT DMS) selaku pengendali dan kepada pihak tertentu, yaitu Michael Steven selaku pemegang saham, Kurniadi Sastrawinata selaku Direktur Utama, Antonius Indradi Sukiman selaku Direktur, serta Henry Wongso selaku Direktur untuk bersama-sama mengganti kerugian Kresna Life.

"Pelanggaran terhadap Perintah Tertulis memiliki dampak pidana bagi Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Perintah Tertulis dimaksud," ujar Ogi.

Dengan dicabutnya izin usaha, Kresna Life wajib menghentikan kegiatan usahanya serta segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim Likuidasi paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha Kresna Life.

Namun demikian, pemegang polis dapat menghubungi manajemen Kresna Life dalam rangka pelayanan konsumen sampai dengan

dibentuknya Tim Likuidasi. "Tim Likuidasi selanjutnya bertugas melakukan pembebasan harta dan penyelesaian kewajiban, termasuk kewajiban terhadap pemegang polis," ujar Ogi.

Selain itu, OJK melakukan upaya perlindungan konsumen, dengan beberapa kali memfasilitasi pengaduan konsumen, di antaranya mempertemukan pemegang polis dengan Kresna Life untuk mendapatkan penyelesaian pengaduan konsumen. OJK juga telah memberikan edukasi di beberapa kota kepada pemegang polis mengenai SOL beserta akibat hukum atas konversi tagihan/klaim asuransi menjadi pinjaman subordinasi. @bauri/ast

Judul	Berita Foto - Kerja Sama Asuransi Jiwa Kredit
Nama Media	Ekonomi Neraca
Newstrend	Proteksi Bank MANTAP melalui produk Asuransi Jiwa Kredit
Halaman/URL	5
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	Positive



KERJA SAMA ASURANSI JIWA KREDIT : Direktur Finance, Risk & Operations PT Bank Mandiri Taspen (MANTAP) Atta Alva Wanggal (kiri) bersama Direktur Sales & Marketing PT Heksa Solution Insurance (Heksa) Marlanto Soemarno menunjukkan naskah kerjasama usul penandatanganan di Jakarta, Jumat (23/6). Kerja sama ini berkomitmen untuk menghadirkan layanan produk bancassurance yang dapat memberikan solusi proteksi bagi nasabah Bank MANTAP melalui produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK). Dengan fasilitas ini, nasabah Bank MANTAP mendapatkan manfaat berupa pelunasan kredit kepada bank apabila debitur mengalami risiko meninggal dunia.

Judul	Sambut Tahun Ajaran Baru, Cek Ulang Kondisi Finansial
Nama Media	Radar Cirebon
Newstrend	Group Head Astra Life mengimbau
Halaman/URL	2
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	Positif

Sambut Tahun Ajaran Baru, Cek Ulang Kondisi Finansial

JAKARTA-Menyambut tahun ajaran baru, sejumlah orang tua mulai bersiap untuk

mengeluarkan dana keperluan anak sekolah. Dana yang sudah dipersiapkan jauh hari akan segera digunakan untuk berbagai keperluan seperti membeli perlengkapan seragam, alat tulis, tas dan sepatu sekolah bahkan hingga dana kursus atau pun bimbel.

Namun sebelum dana digunakan, Astra Life menganjurkan kepada kepala keluarga untuk mapping ulang kondisi finansial, sebab dalam pos keuangan tersebut ada kebutuhan untuk proteksi asuransi jiwa yang juga perlu dievaluasi.

Windy Riswanto selaku Marketing & Alternate Channel Group Head Astra Life mengimbau, agar dalam mengelola keuangan menyambut tahun ajaran baru, orang tua juga harus memperhatikan juga pada pos-pos keuangan yang sudah ditentukan sebelumnya.

"Lakukan evaluasi dan mapping terhadap kondisi keuangan dan tidak lupa untuk

evaluasi polis asuransi jiwa yang dimiliki agar lebih tepat guna," kata Windy.

Sebagai orang tua dan pencari nafkah dalam keluarga, lanjut Windy, penting untuk memiliki safety net berupa asuransi jiwa.

Menurutnya, bila pencari nafkah

terkena musibah seperti penyakit kritis atau tutup usia dini, sehingga tidak bisa menghasilkan nafkah lagi, maka Uang Pertanggungan (UP) dari asuransi jiwa bisa dipakai untuk melanjutkan pendidikan anak hingga tamat kuliah.

"Di momen menghadapi tahun ajaran baru inilah yang menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi keuangan sekaligus evaluasi polis," ujarnya.

Menurutnya, semakin bertambah anggota keluarga maka akan semakin besar pengeluaran

operasional dan pertanggungan yang dibutuhkan.

Apa lagi ketika anak menghadapi tahun ajaran

baru, orang tua atau pun kepala

keluarga perlu menghitung pos dana yang akan dikeluarkan.

Sementara itu, besaran UP sebaiknya harus memenuhi aspek pengeluaran tahunan keluarga yang ditinggalkan begitu juga perlu disesuaikan dengan perhitungan inflasi.

"Produk asuransi yang dimiliki pun sebaiknya dilakukan penyesuaian agar perlindungan dapat tercover secara optimal," tandasnya.

Setelah mengetahui beberapa manfaat dari evaluasi polis, segera lakukan evaluasi polis asuransi yang dimiliki. "Jangan ragu untuk bertanya dan manfaatkan layanan contact center yang ada pada perusahaan asuransi jiwa," pungkasnya. **(rls)**

Judul	OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Jiwa Kresna Life
Nama Media	Lampung Post
Newstrend	OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Kresna Life
Halaman/URL	2
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	Negative

Kresna Life sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak mampu menunjukkan komitmen penambahan modal.

SILVIA AGUSTINA
silvia@lampungpost.co.id

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Sebab, sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus, rasio solvabilitas (*risk based capital*) Kresna Life tetap tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan Kresna Life tidak mampu menutup defisit keuangan, yaitu selisih kewajiban dengan aset melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.

"OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Kresna Life untuk memperbaiki kondisi keuangan. Upaya terakhir mereka melalui penambahan modal oleh pemegang saham pengendali dan penawaran

konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (*subordinated loan/SOL*) tidak dapat dilaksanakan," kata Ogi dalam konferensi pers, Jumat (23/6).

Kresna Life sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak mampu menunjukkan komitmen penambahan modal dari pemegang saham melalui *escrow account* dan menyampaikan perjanjian konversi SOL yang diaktanotariikan.

Dalam upaya melindungi kepentingan konsumen, pemegang polis, dan/atau tertanggung dan untuk melaksanakan kewenangan.

Ditetapkan Kerugian

OJK menetapkan perintah tertulis yang memerintahkan PT Duta Makmur Sejahtera (PT DMS) selaku pengendali dan kepada pihak tertentu, yakni Michael Steven selaku pemegang saham, Kurniadi Sas-trawinata selaku direktur utama, Antonius Indradi Sukiman selaku direktur, serta Henry Wongso selaku direktur untuk bersama mengganti kerugian Kresna Life.

Hal ini tertuang dalam UU Nomor 21 /2011 tentang OJK yang telah diubah dengan UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Pe-

"OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Kresna Life untuk memperbaiki kondisi keuangan."

nguatan Sektor Keuangan, UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian yang telah diubah dengan UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan POJK 18/2022 tentang Perintah Tertulis.

"Pelanggaran terhadap perintah tertulis memiliki dampak pidana bagi Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis

dimaksud," kata Ogi.

Upaya perlindungan konsumen juga dilakukan OJK dengan beberapa kali melakukan fasilitasi pengaduan konsumen, yaitu mempertemukan pemegang polis dengan Kresna Life untuk mendapatkan penyelesaian pengaduan konsumen.

"Selain itu, OJK juga telah memberikan edukasi di beberapa kota kepada pemegang polis mengenai SOL beserta akibat hukum atas konversi tagihan/klaime asuransi menjadi pinjaman subordinasi," kata Ogi.

Tindakan pengawasan yang dilakukan OJK, termasuk pencabutan izin usaha Kresna Life, dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat.

Dengan dicabutnya izin usaha, Kresna Life wajib menghentikan kegiatan usahanya serta segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha Kresna Life. (MI/ET)

OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Jiwa Kresna Life

Judul	Nasib Nasabah Kresna Life
Nama Media	Pas FM
Newstrend	OJK Cabut Izin Usaha Asuransi
Halaman/URL	https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.06/5d14514001cd071a143ae025dbbb1f0e4101e150e17fc2f07980ca3dc42a580b
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	Positif

Nasib nasabah asuransi Kresna Life masih gelap usai dicabutnya izin usaha perusahaan itu oleh OJK pasalnya OJK memerintahkan likuidasi opsi ini justru menimbulkan kekhawatiran dana nasabah sulit berkembang Kuasa hukum mendesak bersama-sama dengan perusahaan asuransi jiwa ini untuk menggugat OJK secara perdata ditambah secara pribadi pejabat yang tanda tangan cabut izin untuk dianggap menyebabkan kelalaian dan dugaan lemahnya pengawasan serta Perlindungan Konsumen. Beni (kuasa hukum) memaparkan sebagai regulator sebaiknya OJK tidak memberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha bahkan mencabut izin usaha. Dia berharap OJK bisa memperbaiki keputusan pencabutan izin usaha tersebut memang nasabah berharap OJK bisa dari perusahaan asuransi ini akan menjadi kreditur preference atau pihak yang pembayarannya diprioritaskan tapi jika dilihat dari aset yang dimiliki Krisna life jumlahnya masih jauh dari nilai kewajiban yang mencapai 5,2 triliun. Selain itu berkaca dari likuidasi sedang berjalan di asuransi jiwa Wana Artha Life ternyata prosesnya tidak berjalan cepat justru banyak menemukan hambatan salah satunya urusan pidana yang bisa menghambat berjalannya proses likuidasi

Judul	Bos Kresna Life Mundur
Nama Media	Pas FM
Newstrend	OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Kresna Life
Halaman/URL	https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.06/b73dde2f20828998568dc85f275f29d6aceb3949ae93dcb4d1bc4d46e723766
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	neutral

▶ 0:00 / 0:40 — 🔊 ⋮

Bos Kresna Life mundur 3 Bos Kresna Life kompak mundur dari jabatannya usai OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut sekretaris perusahaan Kresna life menyebut surat pengunduran diri 3 pimpinan itu diterima hari Rabu Lalu 3 pimpinan yang mundur adalah komisaris utama Direktur Utama Direktur lainnya. sebelumnya OJK resmi mencabut izin usaha PT asuransi jiwa Kresna atau Kresna life karena tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas atau risk best Capital yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku

Judul	Bos Kresna Life Mundur
Nama Media	Pas FM
Newstrend	Asuransi AJB Bumiputera 1912 terus mengupayakan likuiditas
Halaman/URL	https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.06/83a644db32da136cd343fd16d1df96000cffd5413c2107e2786eefc444f7b1fa
Tanggal Berita	2023-06-26
Sentimen	neutral

▶ 0:00 / 1:01 — 🔊 ⋮

Asuransi AJB Bumiputera 1912 terus mengupayakan likuiditas untuk bisa memenuhi kewajiban kepada pemegang saham salah satunya adalah dengan melakukan penjualan aset property di Surabaya tersebut sedang dalam tahap perjanjian pengikatan jual beli ppjp proses menuju pembuatan akta jual beli penjualan aset ini memang untuk menguatkan likuiditas dari AJB Bumiputera yang sedang kesulitan untuk mencicil nilai akses yang dimiliki AJB Bumiputera mencapai 12 Triliun Rupiah aset properti mendominasi dari keseluruhan total aset tersebut dengan nilai mencapai sekitar 7 triliun Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan peluang bagi perusahaan asuransi jiwa untuk meminjam dana ke bank

Judul	Semarang Group Ride ke-8 GFNY Bali - IFG Life: Pacu Adrenalin di Kota Nan Penuh Sejarah
--------------	---

Nama Media	inews.id
Newstrend	Asuransi IFG Life sponsor utama GFNY Bali 2023
Halaman/URL	https://www.inews.id/multimedia/photo/semarang-group-ride-ke-8-gfny-bali-ifg-life-pacu-adrenalin-di-kota-nan-penuh-sejarah
Tanggal Berita	2023-06-25
Sentimen	Positif

Semarang Group Ride ke-8 GFNY Bali - IFG Life: Pacu Adrenalin di Kota Nan Penuh Sejarah

Yudistiro Pranoto - Minggu, 25 Juni 2023 - 16:13:00 WIB



GRI atau Group Ride Indonesia ke-8 mengeksplorasi Semarang dalam 50 kilometer, Minggu (25/6/2023).

SEMARANG, iNews.id - Jangan pernah lewatkan kota cantik bernama Semarang, karena terlalu banyak hal menarik di ibukota provinsi Jawa Tengah ini. Karenanya, GRI atau Group Ride Indonesia ke-8 mengeksplorasi Semarang dalam 50 kilometer, Minggu (25/6/2023).

"Semarang terkenal dengan komunitas dan klub sepedanya. Di kota ini setiap tahunnya ada lomba seri nasional balap sepeda yang menjadi barometer bagi atlet-atlet usia dini, yaitu lomba Tugu Muda Semarang," kata Group Leader GFNY Indonesia, M. Mahful, "selain bahwa banyak lokasi di Semarang yang menjadi episentrum pegiat roadbike di pagi hari."

Lokasi yang dimaksud misalnya Simpang Lima Semarang, Banjir Kanal Barat, hingga Velodrome Diponegoro. Karena itulah, GRI ke-8 ini mencoba menjelajah jalur favorit para 'pemburu angin' Kota Semarang. Dimulai dari Hotel Santika Premiere Semarang, menuju Kota Tua, Tugu Muda, mulai menanjak di Ngaliyan, dan memasuki salah satu wilayah paling tinggi yaitu Gunung Pati (300 MdPL), Goa Kreo (350 MdPL), Kalialang, Sampangan, Kaligarang, Simpang Lima, dan finish kembali di Hotel Santika Premiere Semarang.

Founder GFNY Indonesia, Axel Moeller mengatakan bahwa komitmen GFNY Indonesia adalah mendukung pariwisata dan pergerakan ekonomi Indonesia, yaitu dengan memfasilitasi komunitas roadbike di seluruh Indonesia. "Di Semarang, Anda bisa melihat Kota Tua, Lawang Sewu, Kelenteng Sam Poo Kong, Museum Kereta Api Ambarawa, dan masih banyak lagi," katanya. Bahkan area Goa Kreo yang dilewati GFNY Riders merupakan area wisata yang meliputi goa, Waduk Jatibarang, hutan alami yang dihuni banyak monyet yang konon awalnya merupakan peliharaan Sunan Kalijaga. "Memang menarik sekali pariwisata di Kota Semarang ini," kata Axel.

Seperti GRI sebelumnya, seluruh peserta GRI mendapatkan proteksi asuransi jiwa dan kecelakaan yaitu IFG LifeSAVER dari Asuransi IFG Life yang merupakan sponsor utama GFNY Bali 2023.

Judul	Generali Indonesia Sediakan Medical Check Up Gratis di Friendship Run Semarang
Nama Media	beritajateng.tv

Newstrend	Generali Indonesia Sediakan Medical Check Up Gratis di Event Friendship Run Semarang
Halaman/URL	https://beritajateng.tv/generali-indonesia-sediakan-medical-check-up-gratis-di-friendship-run-semarang/
Tanggal Berita	2023-06-25
Sentimen	Positif

Generali Indonesia Sediakan Medical Check Up Gratis di Friendship Run Semarang

 Elly Amaliyah
25 Juni 2023



SEMARANG, beritajateng.tv – PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia atau Generali Indonesia berikan medical check up gratis pada Friendship Run di Kota Semarang. Ini merupakan rangkaian dari ajang Borobudur Marathon 2023.

“Pada Friendship Run 5K di Semarang, kami turut hadir memeriahkan acara dengan menyediakan mini Medical Check Up Gratis. Medical check up hadir bagi pelari dan pengunjung. Generali juga membuka kesempatan bagi masyarakat dan pelari yang ingin mengetahui proteksi Generali lebih detail.” kata Vivin Arbianti Gautama selaku Chief Marketing Officer Generali Indonesia di Semarang, Minggu 25 Juni 2023.

Ia menyebut Friendship Run 5K hadir di 10 kota di Indonesia. Setelah terselenggara di Jakarta dan Bandung, hari ini Friendship Run hadir di Semarang. Dan selanjutnya akan berlanjut di kota Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Banjarmasin, Medan, serta Palembang.

Generali Indonesia hadir sebagai official insurance partner Borobudur Marathon 2023 untuk ke enam kalinya sejak tahun 2018.

Generali kembali bekerja sama dan mendukung lomba lari berskala internasional yang akan terselenggara pada 19 November 2023.

Judul	12 Pelari Pemenang di BFI RUN 2022 Akan Ikut Lomba Marathon Berlin dan Istanbul
--------------	---

Nama Media	inews.id
Newstrend	Lomba BFI RUN 2023
Halaman/URL	https://beritajateng.tv/generali-indonesia-sediakan-medical-check-up-gratis-di-friendship-run-semarang/
Tanggal Berita	2023-06-25
Sentimen	Positif

12 Pelari Pemenang di BFI RUN 2023 Akan Ikut Lomba Marathon Berlin dan Istanbul

 Ibnu Hariyanto - Minggu, 25 Juni 2023 - 14:19:00 WIB



Perhelatan BFI RUN 2023 dimeriahkan oleh 5.000 peserta di kawasan Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten (25/6/2023). (foto: Istimewa)

TANGERANG, iNews.id- Perhelatan **BFI RUN 2023** dimeriahkan oleh 5.000 peserta di kawasan Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten (25/6/2023). Ada 12 pemenang di BFI RUN 2023 akan terbang ke **Marathon** Berlin dan Istanbul.

BFI RUN ajang lomba lari milik PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) di selenggarakan sejak 2016. Ajang selalu menawarkan sensasi istimewa di setiap gelarannya.

Kali ini, BFI RUN 2023 siap terbangkan dua belas pelari terpilih untuk mengikuti **Berlin Marathon** pada September 2023 dan Istanbul Marathon pada November 2023.

“Kami berharap BFI RUN 2023 dapat memberikan manfaat positif bagi kita semua. Kami juga ucapkan selamat bagi para pemenang yang telah memaksimalkan seluruh energi dan potensinya sehingga memperoleh hasil terbaik. Antusiasme dan sambutan positif dari seluruh elemen yang terlibat dalam acara ini memotivasi kami untuk selalu memberikan suguhan acara yang istimewa di setiap tahunnya,” kata Direktur Keuangan BFI Finance, Sudjono, Minggu (25/6/2023).

Judul	MNC Life Edukasi Pentingnya Perencanaan Dana Pendidikan Anak di HUT ke-25 Morula IVF
Nama Media	inews.id
Newstrend	MNC Life Edukasi Perencanaan Dana Pendidikan Anak
Halaman/URL	https://beritajateng.tv/generali-indonesia-sediakan-medical-check-up-gratis-di-friendship-run-semarang/
Tanggal Berita	2023-06-25
Sentimen	Positif

MNC Life Edukasi Pentingnya Perencanaan Dana Pendidikan Anak di HUT ke-25 Morula IVF

Hari Tambayong - Minggu, 25 Juni 2023 - 13:47:00 WIB



MNC Life mengedukasi tentang pentingnya perencanaan dana pendidikan anak di HUT ke-25 Morula Indonesia. (Hari Tambayong).

SURABAYA, iNews.id - **MNC Life** memberikan **edukasi** dan pesan kepada orang tua maupun masyarakat tentang pentingnya perencanaan keuangan dan asuransi, salah satunya untuk **pendidikan anak**. Edukasi itu disampaikan MNC Life di acara peringatan ulang tahun ke-25 Morula IVF, Sabtu (24/6/2023).

Regional Sales Head PT MNC Life Assurance, Daniel Davendra, mengatakan, perencanaan keuangan, khususnya terkait pendidikan sangat penting untuk menjamin anak mendapat pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Hal itu seiring banyaknya kebutuhan dalam rumah tangga.

Judul	Izin Usaha Kresna Life Dicabut, 3 Pengurus Kresna Graha (KREN) Kompak Mundur
--------------	--

Nama Media	inews.id
Newstrend	OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Kresna Life
Halaman/URL	https://www.inews.id/finance/bisnis/izin-usaha-kresna-life-dicabut-3-pengurus-kresna-graha-kren-kompak-mundur
Tanggal Berita	2023-06-25
Sentimen	Negative

Izin Usaha Kresna Life Dicabut, 3 Pengurus Kresna Graha (KREN) Kompak Mundur

 Dinar Fitra Maghiszha - Minggu, 25 Juni 2023 - 17:59:00 WIB



Izin usaha Kresna Life dicabut, 3 pengurus Kresna Graha (KREN) kompak mundur. (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah pengurus PT **Kresna Graha Investama Tbk (KREN)** kompak **mengundurkan diri** dari posisi mereka di perusahaan. Itu dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut **izin usaha** entitasnya, PT Asuransi Jiwa Kresna (**Kresna Life**).

Mereka yang mundur dari jabatannya, yakni Ingrid Kusumodjojo selaku Komisaris Utama, Michael Steven sebagai Direktur Utama, dan Direktur atas nama Dewi Kartini Laya.